

BAB II

KEAMANAN MANUSIA SEBAGAI ISU GLOBAL DAN KONTRIBUSI JEPANG DALAM MENGATASINYA

Isu keamanan saat ini semakin berkembang dan tidak lagi berfokus pada negara dan teritorialnya serta penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas negara kini mulai kurang relevan karena isu keamanan sudah meluas ke sektor individu dan telah masuk ke aspek politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Konsep keamanan tradisional yang dilahirkan oleh pemikiran kaum realis kini sudah mulai usung dan belum bisa memberikan jaminan keamanan bagi bangsa suatu negara. Oleh sebab itu keamanan sudah mulai berubah dari negara menjadi individu dan ancaman pada saat ini tidak hanya datang dari militer namun non-militer. Pada tahun 1994 UNDP mengeluarkan laporan mengenai keamanan manusia. Dalam laporan ini disebutkan bahwa terdapat tujuh dimensi yang akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi. Masalah keamanan ekonomi yang terjadi negara berkembang juga lebih rumit dan kompleks dibanding negara maju.

Oleh sebab itu, Jepang berupaya untuk mengatasi masalah tersebut secara serius dengan memasukkan dimensi keamanan manusia kedalam *Official Development Assistance* (ODA) negaranya. ODA Jepang yang mengambil dimensi "Keamanan Manusia" sebagai landasan pemberian bantuan luar negeri mereka. Perspektif "keamanan manusia" jelas ditetapkan sebagai posisi penting diplomasi dalam prinsip dasar Piagam ODA yang direvisi pada Agustus 2003. Kemudian Kebijakan Jangka Menengah Baru tentang ODA direvisi pada Februari 2005, berdasarkan revisi tersebut, Piagam memposisikan

"keamanan manusia" sebagai perspektif yang harus mendukung program ODA secara keseluruhan.

A. Munculnya Isu-Isu keamanan Non-Tradisional di dalam Hubungan Internasional

Awalnya studi hubungan internasional selama Perang Dingin, baik dalam hal teori dan praktek, didominasi oleh paradigma realis yang menekankan pada gagasan pelestarian negara dari ancaman yang berasal dari sumber eksternal. Konsepsi semacam itu bersifat rabun dan mempersempit analisis masalah internasional dan keamanan. Selama dekade terakhir, khususnya selama era pasca-Perang Dingin, berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperluas agenda keamanan dengan memasukkan isu-isu sektor lain selain militer, seperti politik, ekonomi, sosial, dan ekologi (Singh & Nunes, 2016).

Kajian keamanan dalam studi HI kini mulai berkembang, semenjak masuknya pemikiran baru yang mendominasi studi keamanan dalam lingkup yang lebih kontemporer. Seperti yang dijelaskan oleh Barry Buzan dalam bukunya "People, States and Fear," salah satu teks pertama dalam studi internasional, dengan tegas dan luas berpendapat untuk memperluas pandangan tentang keamanan. Buku ini menandai terobosan nyata dalam literatur, memperluas dan memperdalam konsep keamanan dengan cara membuka seluruh bidang subjek yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu karya Barry Buzan sangat penting dalam pengembangan studi keamanan sebagai inti dari apa yang dijuluki oleh Bill McSweeney dengan nama "The Copenhagen School" (McSweeney, 1999, p. 83). Meskipun, banyak cendekiawan kontemporer yang cukup andil dalam aliran pemikiran ini, hanya Barry Buzan dan Ole Waever yang paling berpengaruh dan menonjol.

Jika sebelumnya pada era perang dingin keamanan militer merupakan satu-satunya yang berpengaruh dalam studi keamanan tradisional, lain halnya dengan argumen utama yang diajukan oleh Buzan dalam memperluas agenda keamanan yang melibatkan atau menyertakan lima sektor, yaitu politik,

ekonomi, sosial, ekologi dan militer. Sektor-sektor ini diperlukan untuk menjadi bagian dari wacana keamanan, khususnya di tahun 1980-an, karena perubahan dalam lingkungan kebijakan yang dihadapi oleh negara-negara pada saat perang dingin. Selain itu, Buzan juga membahas individu sebagai 'unit dasar tereduksi' untuk diskusi tentang keamanan. Tetapi bagi Buzan, individu tidak bisa menjadi objek rujukan untuk analisis keamanan internasional karena harus negara yang menjadi rujukan tersebut, *pertama* alasannya adalah negara mempunyai peran penting dalam mengatasi dengan sistem sub-negara dan masalah keamanan internasional, negara juga berperan sebagai agen utama untuk pengentasan masalah ketidakamanan. *Kedua*, negara adalah aktor dominan dalam sistem politik internasional. Dalam hal ini, Buzan berusaha untuk memperluas definisi keamanan sambil memfokuskan tentang keamanan di tiga tingkat (sub-state, negara, dan sistem internasional). Tetapi dalam semua ini, negara adalah objek acuan karena negara yang berdiri pada antarmuka dan antardinamika keamanan di tingkat sub-negara serta dinamika keamanan yang beroperasi pada tingkat sistem internasional (Croft & Terriff, 2000, p. 83).

Dengan demikian, meskipun terjadi pelebaran definisi keamanan, Buzan terus menempatkan ketergantungan pada negara sebagai objek rujukan dan tidak seperti Ken Booth yang lebih suka berfokus pada individu (Booth, 1999, pp. 313-326). Booth berpendapat bahwa negara bukan rujukan utama untuk keamanan karena tiga alasan: *Pertama* negara tidak dapat diandalkan sebagai referensi utama karena beberapa yang ada pada komponen negara sementara berada dalam urusan keamanan (internal dan eksternal). *Kedua* beberapa komponen lainnya tidak berada dalam urusan keamanan tersebut atau bahkan komponen lainnya merupakan produsen keamanan (internal dan eksternal) yang mewakili sarana pencapaian dan bukan tujuan. Lalu yang *ketiga*, negara-negara terlalu beragam dalam karakter mereka untuk melayani dasar-dasar dari teori keamanan yang komprehensif (Booth, 1999, p. 320). Booth

ingin menempatkan emansipasi manusia di pusat studi keamanan pada lingkup negara.

Namun, pada awal 1990-an, perubahan besar yang terjadi pada keamanan Eropa akibat berakhirnya perang dingin membuat Buzan sulit untuk mempertahankan pandangannya bahwa negara adalah objek rujukan untuk keamanan. Oleh karena itu, Weaver dan Buzan memperkenalkan konsep atau gagasan keamanan sosial sebagai cara yang paling efektif untuk memahami agenda keamanan yang muncul di pasca Perang Dingin Eropa (Buzan, Waever, & Wilde, 1990). Menurut Ole Waever konsep keamanan memiliki dua makna. *Pertama*, karena sedang digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang berarti kebebasan dari ancaman dan yang *kedua*, cara itu sedang digunakan dalam pengertian akademik, terutama studi keamanan, untuk menangkap kelangsungan hidup negara. Sementara argumen yang menyoroti ancaman terhadap keamanan 'individu' atau 'global' telah menjadi lebih populer dalam perdebatan kontemporer, Waever menegaskan bahwa tidak ada konsep keamanan individu maupun internasional' (Waever, 1995, p. 48).

Dia lebih jauh mengakui bahwa dinamika keamanan, baik di tingkat individu maupun internasional, dapat dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keamanan nasional. Waever mendukung konseptualisasi dari bidang keamanan dalam hal dualisme antara keamanan negara dan keamanan masyarakat. Waever percaya bahwa konseptualisasi ini sangat diperlukan dalam konteks Eropa mengingat integrasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung pada Uni Eropa. Sebagai dispersi progresif kekuasaan politik dipahami oleh warga sebagai demonstrasi bahwa mencoba negara-negara Eropa menderita ketidakmampuan untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan mereka (Waever, 1995, p. 67), Waever menegaskan bahwa ancaman yang dirasakan terhadap identitas budaya atau sosial akan menjadi semakin penting. Ia juga berpendapat bahwa ancaman keamanan nasional dapat dipandang sebagai 'perkembangan yang mengancam

kedaulatan atau kemandirian suatu negara dengan cara yang sangat cepat atau dramatis, dan mencabutnya dari kapasitas untuk mengelola dirinya sendiri (Waeber, 1995, p. 54).

Di sisi lain, menurut Ayoob, “keamanan atau ketidakamanan” didefinisikan dalam hubungannya dengan kerentanan, baik internal maupun eksternal yang mengancam atau memiliki potensi untuk menurunkan atau secara signifikan melemahkan struktur negara, baik teritorial, institusional dan rezim (Ayoob, 1997, pp. 212-146). Definisi dari Ayoob ini menyangkut lembaga politik yang diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Ayoob tidak hanya secara eksplisit memasukkan kerentanan militer atau ancaman terhadap integritas teritorial suatu negara sebagai konseptualisasi, tetapi juga meluas sampai ke ide keamanan dengan memperhatikan masalah yang dibayangkan atau masalah yang melewati ambang sehingga menjadi isu politik.

Dengan kata lain isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemanan ekonomi, pengungsi, dan degradasi lingkungan juga akan menjadi ancaman keamanan nasional setelah isu tersebut dipolitisir dan menuntut respon dari pemerintah. Definisi Ayoob untuk memasukkan lebih banyak jenis ancaman potensial memungkinkan para sarjana untuk memperhitungkan beberapa contoh dari konflik negara intrastate dan antar kasus-kasus kekerasan yang terutama muncul di era pasca Perang Dingin. Namun, Ayoob juga membatasi definisi ini ketika ia berpendapat bahwa untuk setiap potensi ancaman yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional merupakan masalah yang terjadi karena politisasi isu dengan kemungkinan mengancam kelangsungan hidup negara, batas-batasnya, lembaga-lembaga politik, atau rezim yang mengatur.

Terlepas dari keterbatasan definisi tersebut, pergeseran dalam studi keamanan sangat penting karena ia memberikan ruang untuk memasukkan faktor-faktor yang tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara. Sementara keamanan negara

hanya berfokus pada nilai inti kedaulatan, keamanan sosial bukannya berfokus pada identitas sebagai wakil dalam kemampuan masyarakat untuk mempertahankan pola tradisional identitas nasional, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Bagi Buzan, Waever dan Ayoob, keamanan sosial tidak berarti pergeseran fokus dari keamanan negara, tetapi harus tetap di jantung analisis keamanan sejak masalah keamanan sosial adalah mereka yang tampak jauh lebih relevan dengan perdebatan dari tahun 1990-an. Pada akhirnya dualitas antara keamanan negara dan keamanan sosial yang sebelumnya memiliki kedaulatan sebagai kriteria utamanya, kini berakhir karena disatukan oleh kekhawatiran tentang identitas (Buzan, Waever, & Wilde, 1990, pp. 23,25-55). Dengan demikian, Copenhagen School hanya membuktikan bahwa masalah keamanan kontemporer secara kompleks tidak dapat dipadukan dengan konsep tradisional dalam perdebatan keamanan negara karena pemikiran Copenhagen School muncul untuk memperluas konsep dan analisis isu-isu keamanan dalam konteks yang lebih luas antara negara dan masyarakat.

Setelah perang dingin berakhir, isu keamanan yang awalnya bagian dari kajian *high politic issues* kini mulai bergeser ke lingkup kajian *low politic issues* sehingga tiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam menanggapi fenomena perubahan tersebut. Konsep keamanan mengalami perkembangan dari isu-isu keamanan tradisional ke isu keamanan non tradisional terutama dari orientasi masyarakat yang semakin multidimensional seperti sosial, lingkungan dan ekonomi yang tentunya tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lain (Buzan B. , 1991). Barry Buzan membagi lima dimensi keamanan yang saling terkait satu sama lain yaitu *politik, militer, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan*. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah keamanan saat ini lebih kompleks dan tidak hanya terbatas pada persaingan *power* negara-negara besar di dunia, namun telah melewati segala aspek kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia yang bawa oleh proses globalisasi, akibatnya fenomena ini telah menimbulkan masalah-masalah keamanan

baru yang lebih langsung mengancam penduduk di suatu negara.

B. Konsep keamanan Manusia sebagai Pilar Kebijakan Luar Negeri Jepang

Mulai dari premis bahwa akhir Perang Dingin memberikan dorongan untuk memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali konsep keamanan. Sekarang negara sedang dihadapkan oleh ancaman jenis baru yang pengaruhnya cukup besar dalam mengancam kehidupan warga negaranya. Ancaman perang atau nuklir tidak akan cukup melengkapi konsep keamanan itu sendiri. Maka dari itu United Nations Development Program (UNDP) mengusulkan bahwa fokus keamanan harus bergeser dari ancaman kemananan nuklir ke keamanan manusia. Menurut laporan UNDP, bagi kebanyakan orang, perasaan tidak aman muncul lebih dari kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari daripada ketakutan akan peristiwa dunia yang mengerikan. Apakah mereka dan keluarga mereka sudah cukup makan? Apakah mereka akan kehilangan pekerjaan mereka? Apakah jalan-jalan mereka aman dari kejahatan? Apakah mereka akan disiksa oleh negara yang represif? Akankah mereka menjadi korban kekerasan karena jenis kelamin mereka? Akankah agama atau asal etnis mereka menjadi sasaran penganiayaan? Dalam analisis terakhir, keamanan manusia adalah anak yang tidak meninggal, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak terpotong, ketegangan etnis yang tidak meledak dalam kekerasan, oposisi yang tidak dibungkam. (UNDP, 1994, p. 22)

Konsep keamanan manusia telah menjadi terkenal setelah laporan UNDP 1994 dikeluarkan. Laporan UNDP mencatat empat fitur utama dari konsep keamanan manusia yaitu masalahnya yang universal, komponennya saling bergantung, mengintervensi lebih awal dan berpusat pada manusia (hak asasi, peluang sosial dan aman dari konflik) (UNDP, 1994, p. 23). Keamanan manusia juga berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan semua orang di mana-mana terutama di rumah mereka, di pekerjaan mereka, di jalan-jalan mereka, di

komunitas mereka dan di lingkungan mereka (Haq, 1972, pp. 1-9)

Keamanan manusia adalah konsep yang lebih sempit daripada konsep pembangunan manusia seperti yang UNDP katakan tentang pelebaran berbagai pilihan yang dapat dibuat oleh manusia (walaupun, tentu saja, ada hubungan yang jelas antara keduanya, karena pembangunan yang gagal atau terbatas dapat menyebabkan kekerasan). Laporan UNDP lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun keamanan manusia selalu berkisar sekitar dua komponen utama yaitu kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan, konsep keamanan cenderung lebih mementingkan yang pertama daripada yang terakhir. Oleh karena itu, konsep perlu bergeser dari paradigma lama untuk mengamankan orang melalui senjata atau militerisasi. Sebaliknya, itu harus fokus pada keamanan orang atau individu melalui pengembangan manusia yang berkelanjutan (UNDP, 1994, pp. 22-24)

Laporan UNDP lebih lanjut menguraikan tujuh bidang keamanan manusia, yaitu *keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan masyarakat dan keamanan politik*. Hal ini juga mengidentifikasi enam ancaman utama terhadap keamanan manusia seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kesenjangan dalam peluang ekonomi, tekanan migrasi, degradasi lingkungan, perdagangan narkoba, dan terorisme internasional (UNDP, 1994, pp. 24-34). Singkatnya, keamanan manusia bukan masalah dengan senjata; itu adalah masalah dengan kehidupan manusia yang martabat. David Baldwin berpendapat untuk pemahaman yang tepat tentang perdebatan mengenai konsepsi keamanan; relevan untuk mendefinisikan istilah tersebut lebih dekat. Ini akan membutuhkan perjanjian tentang makna akar keamanan dan spesifikasi istilah yang lebih besar. Jadi, istilah itu harus dipahami dan dievaluasi dengan mengacu pada serangkaian pertanyaan yang diangkat dan didiskusikan oleh David Baldwin dalam artikelnya, seperti (a) keamanan untuk siapa? (b)

keamanan untuk nilai-nilai yang mana? (c) berapa banyak keamanan? (d) keamanan dari ancaman apa? dan (e) keamanan dengan cara apa? (Baldwin, 1997, pp. 12-18). Jadi, kebijakan keamanan adalah tindakan yang akan membantu untuk mengurangi atau membatasi kemungkinan kerusakan pada nilai yang diperoleh seseorang.

Konsep keamanan manusia lebih dominan daripada perlindungan batas negara, dengan masing-masing individu memberikan kontribusi yang sama terhadap keamanan populasi manusia. Definisi ini memandang ke depan: keamanan seseorang saat ini adalah fungsi dari prospek masa depannya dan yang paling khas, keamanan manusia adalah fungsi dari risiko berada di bawah ambang kesejahteraan, lalu disebut sebagai keadaan kemiskinan umum daripada tingkat kesejahteraan rata-rata (King & Murray, *Rethinking Human Security*, 2001).

Dalam penggunaan umum, kata "keamanan" menunjukkan kebebasan dari berbagai risiko. The Oxford English Dictionary mendefinisikan keamanan sebagai, "Kondisi terlindungi dari atau tidak terkena bahaya; keamanan dan kebebasan dari ancaman, kecemasan atau ketakutan; perasaan aman atau bebas dari atau tidak adanya bahaya." Dalam nada yang sama, Social Security di Amerika Serikat adalah lembaga yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa individu tidak jatuh di bawah ambang batas pendapatan minimum selama masa pensiun. Ide keamanan dengan demikian mengandung dua elemen kunci: orientasi terhadap risiko masa depan dan fokus pada risiko jatuh di bawah beberapa ambang batas kritis. Keamanan tidak identik dengan tingkat rata-rata masa depan kesejahteraan, tetapi berfokus pada risiko ketika nilai-nilai keamanan tersebut hilang. Keamanan hari ini bukan hanya berfungsi sebagai kesejahteraan, tetapi juga prospek untuk menghindari keadaan negara mengalami krisis di masa depan (King & Murray, *Rethinking Human Security*, 2001, p. 592).

Definisi dan ukuran keamanan manusia yang ditawarkan Garry King dan Murray dalam artikelnya yang berjudul "Rethinking Human Security" dimaksudkan untuk merumuskan konsensus yang muncul di komunitas internasional atas beberapa tujuan utamanya. Karena gagasan keamanan manusia adalah untuk meningkatkan kehidupan orang-orang daripada meningkatkan keamanan perbatasan nasional dan isu-isu kunci melintasi perbatasan ini, tindakan terkoordinasi oleh komunitas internasional tampaknya penting. Keterkaitan dan kerjasama yang berkelanjutan di antara pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan bagian lain dari masyarakat sipil juga akan menjadi penting. Bila ini merupakan pernyataan wajar dari konsensus yang muncul, arah masa depan untuk kebijakan pembangunan dan keamanan juga akan sangat terpengaruh. Perlu untuk mempertimbangkan contoh kebijakan dan strategi penelitian yang akan terpengaruh melalui empat strategi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan manusia seperti penilaian risiko, pencegahan, perlindungan, dan kompensasi (King & Murray, *Rethinking Human Security*, 2001, p. 607).

Jadi, intinya keamanan manusia merupakan keamanan yang berpusat pada individu dalam memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Laporan UNDP pada tahun 1994 telah membagi keamanan manusia kedalam 7 dimensi. Namun yang menjadi isu dalam penulisan skripsi ini adalah keamanan ekonomi, dimana isu tersebut merupakan bagian dari tujuh dimensi yang dikeluarkan UNDP dalam laporannya pada tahun 1994.

Tidak lama setelah UNDP memperkenalkan konsep keamanan manusia pada tahun 1994, pemerintah Jepang pertama kali juga turut serta memperkenalkan keamanan manusia melalui pidato Perdana Menteri Murayama di PBB pada Oktober 1995. Konsep "keamanan manusia" yang diperkenalkan oleh UNDP di adopsi oleh pemerintah Jepang sebagai pilar diplomasi negaranya, dan hari ini Jepang telah menjadi pendukung keamanan manusia di komunitas

internasional. Menurut (Nasukawa, 2017), jika ditelusuri lebih lanjut mengenai konsep keamanan manusia yang digunakan oleh Jepang sebagai salah satu pilar kebijakan luar negerinya, terdapat tiga periode yang membentuk konsep tersebut, yaitu:

1. Sejarah dan Perkembangan Keamanan Manusia dalam Diplomasi Jepang

a) Periode awal (Juni 1994 - Juli 1998)

Pada Juni 1994, UNDP pertama kali memperkenalkan konsep keamanan manusia, setelah itu pemerintah Jepang pertama kali juga turut serta memperkenalkan keamanan manusia melalui pidato Perdana Menteri Murayama di PBB pada Oktober 1995. Pada akhir 1997, keamanan manusia menjadi perhatian utama masyarakat internasional dan sangat penting bagi diplomasi Jepang bagi Menteri Luar Negeri Keizo Obuchi pada saat itu. Obuchi kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang dan sangat mementingkan keamanan manusia dalam diplomasi Jepang.

b) Periode pembentukan (Dari Juli 1998 hingga Agustus 2003)

Pada Juli 1998, Obuchi menjadi Perdana Menteri Jepang ke-84. Periode yang dimulai dengan masa pemerintahan Obuchi sebagai perdana menteri dan berlangsung hingga pemerintahan Mori dan Koizumi yang ikut membentuk kerangka kerja diplomasi keamanan manusia Jepang. Pada bulan Desember 1998, Obuchi mengadakan konferensi internasional di Tokyo, dan pada konferensi ini ia berbicara tentang keamanan manusia, yang kemudian menjadi dasar diplomasi Jepang. Dua minggu kemudian, pada 16 Desember 1998, Obuchi memberikan pidato di Hanoi, Vietnam. Dalam pidato kebijakan itu, Obuchi mengungkapkan bahwa "Jepang telah memutuskan kali ini untuk menyumbang 500 juta yen (US \$ 4,2 juta) untuk pembentukan 'Dana Keamanan Manusia' di bawah naungan PBB." Setelah itu, Jepang aktif mempromosikan kebijakan keamanan manusia hingga ke pemerintahan Mori dan Koizumi

Pada KTT Milenium PBB September 2000, Perdana Menteri Mori mengusulkan "untuk membentuk komite internasional tentang keamanan manusia, dengan partisipasi para pemimpin dunia untuk lebih mengembangkan dan memperdalam konsep pendekatan yang berpusat pada manusia ini." Usulan itu membuahkan hasil di tahun berikutnya. Pada Januari 2001, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan membentuk Komisi Keamanan Manusia / *Commission of Human Security* (CHS) dengan Sadako Ogata dan Amartya Sen sebagai ketua bersama dan 12 ahli dari seluruh dunia sebagai anggota.

Pada April 2001, Junichiro Koizumi menjadi Perdana Menteri Jepang ke-89. Koizumi tetap aktif dalam aktivitas CHS. Laporan Akhir CHS untuk Jepang adalah tentang pembentukan *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) dan revisi piagam *Official Development Assistance* (ODA) negaranya. Pada tahun 2003, setelah laporan akhir CHS yang bernama *Human Security Now* selesai, Jepang mulai mempromosikan keamanan manusia melalui kebijakan pemberian bantuan luar negeri dalam ODA negaranya. Pada bulan Februari 2003, Menteri Luar Negeri Junko Kawaguchi memperluas bantuan bilateral berjudul "Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP)." Ini adalah kebijakan khusus kedua Jepang untuk keamanan manusia setelah Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia (TFHS). Jepang dianggap sebagai kontributor utama untuk pengarusutamaan intelektual dari konsep dan implementasi keamanan manusia melalui dukungan keuangannya kepada Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia (TFHS). Kemudian, Piagam ODA, yang diubah pada Agustus 2003, mengadopsi keamanan manusia sebagai salah satu konsep fundamentalnya.

c) Periode Pervasif (Dari Agustus 2003 hingga saat ini)

Menurut *Japan International Cooperation Agency* (JICA), Keamanan Manusia dan Kebijakan Jangka Menengah ODA

dalam revisi Piagam ODA, keamanan manusia didirikan sebagai pilar diplomasi Jepang. Dalam periode ini reformasi JICA adalah kekuatan pendorong. Program JICA juga membentuk sisi praktis diplomasi keamanan manusia Jepang dengan TFHS dan GGP. Pada bulan September 2006, Shinzo Abe menggantikan Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang, dan di bawah pemerintahannya, diplomasi keamanan manusia terus berkembang. Abe menyatakan bahwa pilar diplomasi Jepang menekankan pada keamanan manusia. Pada September 2007, Yasuo Fukuda menggantikan Abe sebagai Perdana Menteri, dan pada Januari 2008, ia memberikan pidato di konferensi Davos di Swiss. Dalam pidatonya, "Dari perspektif 'keamanan manusia,' saya bermaksud untuk fokus pada kesehatan, air, dan pendidikan di KTT G8." Hasilnya, lima dokumen resmi KTT G8 Toyako menyentuh keamanan manusia. Dengan cara ini, pemerintahan Fukuda memosisikan keamanan manusia sebagai konsep diplomasi yang dipromosikan oleh Jepang ke dunia.

2. Latar Belakang Keamanan Manusia dalam Kerangka Kebijakan Luar Negeri Jepang

Nasukawa dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul "*Human Security in Japanese Foreign Policy*" juga menambahkan bahwa ada tiga faktor yang membuat Jepang mengadopsi konsep ini sebagai komponen sentral dari diplomasi negaranya, yaitu :

a) Afinitas dengan Konstitusi Jepang

Faktor pertama adalah afinitas yang dimiliki konsep keamanan manusia dengan konstitusi Jepang. Pembukaan konstitusi Jepang menetapkan bahwa "Kami menyadari bahwa semua orang di dunia memiliki hak untuk hidup dalam damai, bebas dari rasa takut dan keinginan." Poin penting di sini adalah bahwa "perang" bukan satu-satunya antonim yang mungkin untuk "perdamaian." "Damai" yang ditentukan dalam pembukaan didefinisikan secara logis sebagai "kebebasan dari ketakutan dan keinginan" artinya perdamaian tidak dapat

dicapai selama ada "ketakutan dan keinginan." Konsep perdamaian yang komprehensif ini diwujudkan dalam konstitusi yang sudah berorientasi pada keamanan manusia.

b) Kompatibilitas dengan Konsep Keamanan Komprehensif

Faktor kedua adalah kompatibilitas dengan konsep "keamanan komprehensif" pada tahun 1980-an. Pada April 1979, Perdana Menteri Masayoshi Ohira membentuk komite penelitian kebijakan dan laporan akhir komite merumuskan konsep baru keamanan komprehensif. Laporan itu mengatakan, "Keamanan komprehensif berarti bahwa aspek militer dan non-militer dipertimbangkan mengenai tujuan dan metode ketika merumuskan kebijakan keamanan nasional." Konsep keamanan manusia dengan keamanan komprehensif memiliki persamaan karena mendukung pendekatan yang sangat luas.

c) Hasil Akumulatif dari Bantuan Pembangunan Resmi (ODA)

Faktor ketiga adalah lebih dari lima puluh tahun kebijakan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) belum mengalami perubahan, oleh karena itu pada tahun 2003 piagam ODA direvisi untuk memperkenalkan konsep keamanan manusia. Namun, pengenalan konsep ini bukan sekadar penggantian nama kebijakan pemerintah. Keamanan manusia menyatukan berbagai elemen individu yang telah menjadi tujuan kebijakan ODA Jepang. Karena pembatasan konstitusi, ada kecenderungan untuk menghindari memberikan bantuan kepada negara-negara konflik yang tidak stabil. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, tidak mungkin lagi untuk mempertimbangkan perkembangan dan konflik secara terpisah. Dengan pengalaman ini, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Yoriko Kawaguchi, Jepang memulai arah baru untuk menggunakan ODA "secara aktif sebagai sarana untuk mempromosikan kerja sama perdamaian internasional" "tidak hanya terbatas pada tujuan pembangunan."

Karena pengalaman inilah pandangan Jepang tentang keamanan manusia bukan hanya semboyan diplomatik belaka, melainkan sebuah konsep yang sangat terkait dengan pilihan kebijakan dan kegiatan selama bertahun-tahun. Berdasarkan latar belakang sejarah ini, kita dapat melihat dua tujuan dalam promosi keamanan manusia Jepang. *Pertama* adalah "menyebarkan konsep keamanan manusia," dan yang *kedua* adalah "mewujudkan keamanan manusia di lapangan," yang berarti pencapaian keamanan manusia melalui kegiatan ODA (Nasukawa, 2017).

Saat PBB membentuk Komisi Keamanan Manusia (CHS) pada tahun 2001, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan konsep keamanan manusia dan mengusulkan program aksi. Jepang secara luas dan berulang kali mempromosikan pemahaman tentang keamanan manusia melalui pertemuan multilateral dan diskusi bilateral. Kemudian dalam pembentukan Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia (TFHS) pada tahun 1998 dan Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP) pada tahun 2003. TFHS membiayai proyek yang dilakukan oleh organisasi dalam sistem PBB dalam kemitraan dengan entitas non-PBB, untuk memajukan dampak operasional dari konsep keamanan manusia. Sedangkan GGP mendukung proyek yang diusulkan oleh badan-badan seperti LSM dan otoritas pemerintah daerah, memberikan dukungan yang fleksibel dan tepat waktu untuk proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, *Japan International Cooperation Agency* (JICA) mulai menerapkan konsep keamanan manusia pada CHS sebagai dasar dari semua operasi JICA yang baru. JICA melakukan bantuan terpadu untuk menawarkan dukungan komprehensif di negara-negara berkembang. Selain itu, konsep keamanan manusia yang diadopsi oleh Jepang dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sangat beriringan dan kurang lebih memiliki tujuan yang sama dalam mendukung tercapainya keamanan yang berpusat pada individu disemua negara (Nasukawa, 2017).

"Keamanan manusia" berarti "berfokus pada orang perorangan dan membangun masyarakat di mana setiap orang dapat hidup dengan bermartabat dengan melindungi dan memberdayakan individu dan komunitas yang terpapar pada ancaman aktual atau potensial." Jepang percaya bahwa abad ke-21 harus menjadi abad yang berfokus pada manusia. Perspektif "keamanan manusia" jelas ditetapkan sebagai posisi penting diplomasi dalam prinsip dasar Piagam ODA yang direvisi pada Agustus 2003. Kemudian, Kebijakan Jangka Menengah Baru tentang ODA direvisi pada Februari 2005 berdasarkan revisi ODA ini. Piagam memposisikan "keamanan manusia" sebagai perspektif yang harus mendukung ODA secara keseluruhan. Perspektif "keamanan manusia" dapat tercermin dalam ODA dengan mengadopsi pendekatan berikut untuk bantuan: (1) bantuan yang menempatkan orang di pusat perhatian dan yang secara efektif menjangkau orang-orang; (2) bantuan untuk memperkuat komunitas lokal; (3) bantuan yang menekankan pada pemberdayaan orang; (4) bantuan yang menekankan manfaat bagi orang-orang yang terpapar ancaman; (5) bantuan yang menghargai keanekaragaman budaya, dan (6) bantuan lintas sektoral yang memobilisasi berbagai keahlian profesional. Pada TA 2003, bantuan hibah untuk proyek-proyek akar rumput menjadi diperluas peran dan fungsinya menjadi Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP) sehingga sangat mencerminkan doktrin keamanan manusia (Nasukawa, 2017).

3. Posisi Jepang pada "keamanan manusia"

Pesatnya pertumbuhan globalisasi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan komunitas internasional menjadi saling tergantung pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, telah terjadi peningkatan krisis kemanusiaan akibat ancaman transnasional seperti terorisme, perusakan lingkungan, penyebaran penyakit menular termasuk HIV / AIDS, kejahatan terorganisir internasional, krisis ekonomi mendadak, dan perang saudara. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, perspektif "keamanan

manusia” yang menempatkan fokus pada manusia perlu diperkenalkan, di samping perspektif global, regional dan nasional (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005).

"Keamanan manusia" berarti berfokus pada orang perorangan dan membangun masyarakat di mana setiap orang dapat hidup dengan bermartabat dengan melindungi dan memberdayakan individu dan komunitas yang terpapar pada ancaman aktual atau potensial. Secara konkret, ini berarti melindungi individu dari "ketakutan," seperti konflik, terorisme, kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, pemindahan, epidemi penyakit, perusakan lingkungan, krisis ekonomi dan bencana alam, dan "keinginan", seperti kemiskinan, kelaparan dan kurangnya layanan pendidikan dan kesehatan, dan memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat memilih dan mengambil tindakan terhadap ancaman-ancaman ini. Jepang menempatkan empat isu prioritas yaitu "pengurangan kemiskinan," "pertumbuhan berkelanjutan," "mengatasi masalah global" dan "pembangunan perdamaian" yang dijelaskan dalam Piagam ODA dengan mempertimbangkan perspektif "keamanan manusia," untuk mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh orang-orang, komunitas dan negara (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005).

C. Keamanan Ekonomi dalam dimensi Keamanan Manusia

Dalam pandangan tradisional keamanan ekonomi didefinisikan sebagai hal-hal yang terkait dengan memanipulasi pemerintah negara lain dalam membuat kebijakan dinegaranya. Menurut pandangan tersebut keamanan ekonomi merupakan keadaan dimana terjadinya ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi antar negara sehingga menyebabkan kerentanan terhadap negara lain. Namun sejak berakhirnya perang dingin dan arus globalisasi telah menyebabkan konsep keamanan mengalami pergeseran makna yang awalnya berfokus pada negara kini mulai mengarah pada situasi dimana individu

memiliki sumber pendapatan yang stabil serta terpeliharanya standar pemenuhan kehidupan tiap individu dalam jangka waktu yang dekat. Sehingga tidak ada kesenjangan didalam masyarakat dan secara khusus memudahkan individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) (Chotimah, 2017).

Menurut UNDP keamanan ekonomi merupakan kondisi yang mengharuskan pemasukan tetap layak untuk setiap orang. Keamanan ekonomi membutuhkan penghasilan dasar yang terjamin biasanya dari pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, atau dalam upaya terakhir dari beberapa jaring pengaman yang dibiayai publik. Tetapi hanya sekitar seperempat penduduk dunia yang saat ini dapat secara ekonomi aman dalam pengertian ini. Sementara masalah keamanan ekonomi di negara berkembang lebih mengkhawatirkan dibanding negara maju (UNDP, 1994).

Secara sistematis keamanan ekonomi didominasi oleh konteks kegiatan ekonomi itu sendiri, termasuk peran dan fungsi pasar, ketersediaan sumber daya dan tingkatan konsumsi. Buzan dalam persepektif Copenhagen School memberikan perbedaan antara kemandirian ekonomi dan sektor ekonomi yaitu keamanan ekonomi merupakan tentang akses ke sumber daya, keuangan dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang dapat diterima sedangkan sektor ekonomi merupakan hubungan perdagangan, keuangan dan produksi (Buzan B. , 1991). Nesadurai (2005) dalam (Mesjasz, 2008, pp. 5776-577) memberikan alternatif konseptualisasi dari keamanan ekonomi dengan memastikan tingkat kerusakan yang rendah atas aliran pendapatan dan konsumsi minimum bagi manusia atau kebutuhan keluarga, ekuitas distributif dan integritas pasar. Sehingga pandangan ini tidak membuang pendapat neoliberal dalam mengamankan keamanan ekonomi nasional. Tetapi konsep keamanan ekonomi dalam pandangan ini lebih menekankan masalah ekonomi dari aspek sejarah, politik dan konteks sosial dari kehidupan bangsa dan negara.

Melihat konteks yang terjadi pada dunia saat ini, konsep keamanan ekonomi tidak bisa berkembang jika hanya berfokus pada ekonomi makro dan masalah-masalah kelembagaan saja. Oleh karena itu penting untuk memasukkan beberapa atribut keamanan seperti resiko, ancaman, sekuritisasi dan kerentanan, sehingga bisa disesuaikan dengan analisis teori mikroekonomi maupun makroekonomi (Mesjasz, 2008, p. 569). Ada dua tingkatan analisis dalam keamanan ekonomi. *Pertama* pada level global, antar negara dan negara, dalam hal ini ekonomi memiliki kedudukan sebagai faktor penentu keamanan negara sekaligus memiliki dampak terhadap kemakmuran ekonomi yang akan menjadi pertimbangan. *Kedua*, perkembangan teori ekonomi memunculkan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial yang isinya lembaga, perusahaan, daerah dan individu (Mesjasz, 2008, p. 571). Dari tingkatan tersebut, perkembangan konsep keamanan ekonomi dapat dikaitkan dengan aspek lain dalam *human security* dan entitas aktor yang dinamis.

Keamanan ekonomi adalah salah satu dimensi yang sangat penting dalam keamanan manusia. Dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan kekuatan militer bukan lagi yang menjadi fokus utama bagi negara-negara di dunia dalam menghadapi ancaman dari negara lain melainkan lebih kepada peningkatan di sektor ekonomi mengingat perang jenis baru tidak perlu memakai kekerasan fisik ataupun perlombaan senjata yang dibawa oleh militer namun sudah menggunakan ekonomi sebagai alat untuk mengontrol negara lain, sehingga negara-negara di dunia saat ini berlomba-lomba untuk menghadapi persaingan ekonomi yang lebih masif. Sheila R. Ronis mengatakan bahwa salah satu elemen utama dalam keamanan nasional adalah keamanan ekonomi. Saat ini keamanan nasional tidak bisa dilepasakan dari keamanan ekonomi suatu negara sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu bagian infrastruktur di suatu negara adalah perekonomian yang kuat (Ronis, 2011).

Berbagai aktor dan keamanan negara dalam melakukan kegiatan ekonomi dapat dihubungkan melalui tiga cara. *Pertama*, ancaman terhadap kemakmuran dan fungsi suatu negara berkaitan dengan keamanan ekonomi murni. *Kedua*, kemakmuran ekonomi merupakan pemicu untuk meningkatkan kekuatan militer. *Ketiga*, upaya-upaya militer seperti perang dan pengeluaran militer dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara. Disisi lain, lembaga negara biasanya menghubungkan kemakmuran dan standar peningkatan hidup dengan keamanan ekonomi. keamanan ekonomi adalah pemeliharaan kondisi yang diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam produktivitas modal dan tenaga kerja dalam meningkatkan standar hidup masyarakat suatu negara. Keamanan ekonomi terhadap negara juga bisa dipersempit menjadi perlindungan terhadap spionase ekonomi (Mesjasz, 2008, p. 576). Disamping itu ada pandangan lain yang mendefinisikan keamanan ekonomi dalam menjangkau secara langsung pada kondisi hidup individu, kelompok sosial serta perlindungan kaum miskin sehingga penjelasan mengenai keamanan ekonomi semakin dekat dengan konsep tradisional tentang keamanan manusia dan jaminan sosial. Definisi seperti ini merepresentasikan fokusnya terhadap standar hidup individu yang terjamin dan stabil dengan tersedianya sumber daya bagi individu dan keluarga dalam berpartisipasi secara politik, sosial, ekonomi dan budaya sehingga bisa hidup bermartabat di komunitas mereka (Mesjasz, 2008).

Sementara itu, *International Labour Organization (ILO)* dalam (International Labour Organization, 2004) menyatakan bahwa keamanan ekonomi merupakan *basic social security*, yang didefinisikan oleh akses ke kebutuhan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, dan perlindungan sosial, serta keamanan terkait pekerjaan. ILO mengusulkan tujuh komponen keamanan terkait pekerjaan, yaitu :

- a. **Labour market security.** Peluang kerja yang memadai, melalui jaminan lapangan kerja penuh negara;
- b. **Employment security.** Perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang, peraturan tentang perekrutan dan pemecatan, pengenaan biaya pada majikan karena gagal mematuhi aturan, dll .;
- c. **Job security.** Sebuah kedudukan yang sesuai dan ditetapkan sebagai pekerjaan atau "karier", ditambah toleransi terhadap praktik demarkasi, hambatan pengenceran keterampilan, batasan kerajinan, kualifikasi pekerjaan, praktik ketat, serikat pekerja, dll.;
- d. **Work security.** Perlindungan terhadap kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, melalui peraturan keselamatan dan kesehatan, batasan waktu kerja, peraturan jam kerja yang ketat, kerja malam untuk wanita, dll.;
- e. **Skill reproduction security.** Peluang yang luas untuk mendapatkan dan mempertahankan keterampilan, melalui magang, pelatihan kerja, dll .;
- f. **Income Security.** Perlindungan pendapatan melalui upah minimum, indeksasi upah, jaminan sosial yang komprehensif, perpajakan progresif untuk mengurangi ketidakesetaraan dan untuk melengkapi mereka yang berpenghasilan rendah, dll .;
- g. **Representation security.** Perlindungan suara kolektif di pasar tenaga kerja, melalui serikat pekerja independen dan asosiasi pengusaha yang dimasukkan secara ekonomi dan politik ke dalam negara, dll.

Ketujuh komponen tersebut sangat penting untuk keamanan dasar: keamanan pendapatan dan keamanan representasi suara. Keamanan dasar berarti membatasi dampak ketidakpastian dan risiko yang dihadapi orang setiap hari sambil menyediakan lingkungan sosial di mana orang tersebut dapat menjadi anggota berbagai komunitas, memiliki kesempatan yang adil untuk mengejar pekerjaan yang dipilih dan mengembangkan kapasitas mereka melalui apa yang ILO sebut sebagai pekerjaan yang

layak. sementara indeks tambahan dari ILO yaitu jaminan pensiun hari tua sebagai bentuk dalam memperhitungkan keamanan pendapatan bagi orang tua. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sangat diperlukan sebagai unsur yang sangat diperlukan bagi keamanan manusia (International Labour Organization, 2004).

Keamanan ekonomi menjadi kompleks dibidang keuangan, mulai dari tingkat perusahaan, negara dan internasional. Resiko di bidang keuangan memaikan faktor kunci dari dinamika keuangan dan ekonomi internasional baik secara positif maupun negatif. Resiko ini diibaratkan dua sisi koin yang sama. Pada tingkat ekonomi makro, resiko teridentifikasi sebagai krisis besar yang akan mempengaruhi stabilitas keuangan. Dalam skala global, krisis finansial dapat berakibat fatal dalam menjatuhkan sistem finansial dunia yang dikenal dengan the Great Depression yang pernah terjadi pada tahun 1929 serta krisis finansial global pada tahun 1970an dan 2008. Disamping itu, menurut (Mesjasz, 2008, p. 578) krisis finansial dalam skala domestik atau lokal juga dapat memberikan efek domino bagi negara-negara disekitarnya seperti krisis Thailand yang menular ke negara-negara asia tenggara lainnya. Oleh karena itu, sistem keuangan yang tidak stabil disuatu negara akan memberikan ketidakamanan ekonomi pada aspek-aspek seperti kelaparan, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap warganya serta krisis kepercayaan antara masyarakat kepada negara yang akan memunculkan kekacauan politik dan aspek-aspek lainnya (Chotimah, 2017).

Ada 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata di negara berkembang yaitu (1) pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan pendapatan perkapita juga ikut menurun, (2) inflasi yang disebabkan jumlah uang yang beredar bertambah namun tidak diikuti pertambahan produksi barang-barang secara proporsional, (3) pembangunan antar daerah yang tidak merata, (4) investasi besar-besaran terhadap proyek padat modal sehingga pendapatan modal produksi lebih besar dibandingkan

pendapatan hasil kerja, hal ini menyebabkan angka pengangguran semakin bertambah, (5) mobilitas sosial yang rendah, (6) kebijakan kenaikan impor yang menyebabkan harga-harga barang mengalami kenaikan (7) buruknya nilai tukar negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor, dan (8) hancurnya industri kreatifitas rakyat seperti pertukangan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri rumah tangga (Damanik, Zulgani, & Rosmeli, 2018, p. 16)

Selain itu, dampak dari ketidakamanan ekonomi adalah pengangguran, ini merupakan salah satu faktor utama yang mendasari ketegangan politik dan kekerasan etnis di beberapa negara. Tetapi angka pengangguran mengecilkan skala sebenarnya dari krisis karena banyak dari mereka yang bekerja secara serius setengah menganggur. Tanpa jaminan jaring pengaman sosial, yang paling miskin tidak dapat bertahan bahkan dalam waktu singkat tanpa penghasilan. kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan dukungan keluarga atau masyarakat. Namun sistem itu dengan cepat rusak sehingga penganggur harus sering menerima pekerjaan apa pun yang dapat mereka temukan, walaupun tidak produktif atau sangat dibayar (UNDP, 1994, p. 26).

D. Keamanan Ekonomi di Indonesia

Jika mengacu ke pengertian UNDP tentang Keamanan Ekonomi yaitu kondisi yang mengharuskan pemasukan tetap layak bagi setiap orang dan penghasilan dasar yang terjamin melalui pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, atau dalam upaya terakhir dari beberapa jaring pengaman yang dibiayai publik. Lalu pengertian dari Buzan dalam persepektif Copenhagen School yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi merupakan tentang akses ke sumber daya, keuangan dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang dapat diterima. Kemudian ILO juga menyatakan bahwa keamanan ekonomi

merupakan *basic social security*, yang didefinisikan oleh akses ke kebutuhan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, dan perlindungan sosial, serta keamanan terkait pekerjaan. Dari ketiga definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa keamanan ekonomi dapat masuk kedalam isu pembangunan prioritas suatu negara termasuk Indonesia yang sudah merancang program pembangunan nasional untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan dalam akses ekonomi yang lebih terjamin kedepannya.

Sebenarnya tantangan mengenai kemanan manusia terletak pada masalah klasik yaitu kemauan politik. Meskipun keamanan manusia dapat dimasukkan sebagai kerangka kerja kebijakan, namun jelas membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menangani tantangan-tantangan itu dengan serius. Keamanan manusia dianggap sensitif karena memberi kesan bahwa pemerintah tidak berkinerja baik dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat. Penting bagi pemerintah untuk menciptakan citra bahwa negara ini aman dan damai. Pada tahun 2015, JICA Research Institute mengeluarkan penelitian mengenai elemen keamanan manusia mana yang dianggap sebagai prioritas atau yang paling penting di Indonesia. Semua responden cenderung mengangkat masalah yang mereka hadapi seperti kemiskinan; perubahan lingkungan / iklim / deforestasi; kesehatan, diskriminasi agama terhadap minoritas atau konflik agama - ancaman oleh mayoritas, konflik internal / horizontal, konflik tanah, perlindungan perempuan, dan pekerja migran (JICA, 2015, pp. 17-18). Berikut adalah tabel tantangan keamanan manusia terbesar di Indonesia menurut JICA Research Institute :

Grafik 2.1 Tantangan Keamanan Manusia terbesar di Indonesia



Sumber : (JICA, 2015, p. 18) diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel diatas, dimensi keamanan manusia yang paling penting di Indonesia adalah keamanan ekonomi dalam perspektif *freedom from want* (kebebasan dari keinginan). Hal tersebut terbukti dengan besarnya tingkat kesenjangan pendapatan, ketimpangan pendapatan, atau distribusi kesejahteraan / sumber daya yang tidak merata (JICA, 2015, p. 18). Hal ini juga sejalan dengan yang apa disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian dalam Dialog Nasional ke-8 “Indonesia Maju” yang diadakan di Sportorium UMY pada 11 Maret 2018 silam. Tito menyatakan bahwa:

“Korelasi antara ekonomi dan keamanan sangat kuat dan merupakan hubungan yang timbal balik. Apabila ekonomi baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik dan tingkat kejahatan akan turun, begitu pula sebaliknya. Keamanan juga berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, apabila keadaan aman dan kondusif pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri.” (BHP UMY, 2018)

Dari pernyataan tersebut artinya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan berkembang baik bagi masyarakat, perlu adanya jejaring keamanan yang menjaga jalannya perekonomian di suatu negara. Ketika masyarakat mendapatkan akses yang aman dalam meningkatkan perekonomiannya maka akan tercipta stabilitas keamanan negara dan sebaliknya apabila masyarakat mendapatkan ancaman untuk mengakses sumber ekonomi mereka maka stabilitas keamanan negara akan menurun. Masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kesejahteraan telah mendapat perhatian khusus karena kemiskinan dipandang sebagai sumber yang dapat mengarah pada jenis ancaman lainnya, yaitu terorisme, radikalisme, atau ekstremisme. Mirip dengan kemiskinan, perubahan iklim juga dianggap membawa potensi untuk mengarah pada jenis ancaman lainnya, seperti kerawanan pangan, bencana alam, dan cuaca ekstrem (JICA, 2015, p. 19).

E. Peran ODA Jepang dalam Mengatasi Isu Keamanan Manusia di Negara Berkembang

Pada tahun 1960, Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC) membentuk Kelompok Bantuan Pembangunan (DAG) sebagai pertemuan ad hoc untuk mengoordinasikan pemberian bantuan oleh negara-negara donor (negara-negara maju) kepada negara-negara berkembang yang menjadi mitra ekonomi. Pada tahun 1961, OEEC berganti menjadi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan DAG dibentuk kembali sebagai organ berdiri Komite Bantuan Pembangunan (DAC) yang bertugas untuk memperkenalkan konsep *Official Development Assistance* (ODA) (Akiko, 2000, p. 156).

Salah satu anggota DAC adalah Jepang yang mulai bergabung ke OECD pada tahun 1964. Anggota menerima Jepang tidak hanya untuk mendorong bantuannya tetapi juga untuk mendorong liberalisasi perdagangannya sesuai dengan kode dan aturan OECD yang Jepang lakukan. DAC telah mempengaruhi pembuatan kebijakan Bantuan Pembangunan

Resmi / *Official Development Assistance* (ODA) pemerintah Jepang sejak awal. Jepang telah bercita-cita menjadi pendonor yang berkinerja baik dan telah berjuang untuk menyelaraskan kebijakan bantuannya sebanyak mungkin dengan peraturan dan norma yang disepakati DAC (Akiko, 2000). Bantuan ini diberikan Jepang kepada negara-negara berkembang yang menjadi mitra ekonominya dalam membantu pembangunan di negara mereka.

Sebenarnya pemberian bantuan luar negeri Jepang sudah dimulai sejak pasca perang dunia ke-2. Dalam rangka meningkatkan perdamaian global serta upaya Jepang untuk kembali ke komunitas Internasional, Jepang harus menandatangani perjanjian damai San Francisco 1951 dengan Sekutu. Namun berdasarkan perjanjian tersebut, Jepang diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada 12 negara yang ada di Asia Timur dalam bentuk dana kompensasi akibat kerusakan yang ditimbulkan Jepang dan Sekutu selama Perang Dunia ke-2 (Akiko, 2000).

Bantuan asing pertama Jepang ke negara-negara berkembang diberikan dalam bentuk bantuan multilateral melalui partisipasinya dalam Rencana Kolombo untuk Koperasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Asia Pasifik pada bulan Oktober 1954. Rencana Kolombo awalnya diluncurkan pada tahun 1950 di Kolombo, Ceylon (sekarang Sri Lanka) untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi dan teknis di antara negara-negara anggota Persemakmuran Inggris. Pada bulan Februari 1957, Perdana Menteri Kishi menguraikan filosofi Jepang bantuan asing dalam pidato kebijakan luar negerinya sebagai berikut, “Pertama-tama, bantuan Jepang ke negara-negara Asia yang berada di tengah-tengah pembangunan bangsa mereka masing-masing akan meningkatkan kesejahteraan nasional mereka. Kedua, reparasi dan kerja sama ekonomi terhadap negara-negara ini pada akhirnya akan mengamankan pasar ekspor baru untuk industri Jepang dan pada akhirnya akan berkontribusi pada ekonomi Jepang.” Jadi, pada saat itu pemberian bantuan dijelaskan sebagai kompensasi perang,

membayar hutang melalui rekonstruksi pascaperang dan promosi ekspor.

Tidak lama setelah UNDP memperkenalkan konsep keamanan manusia pada tahun 1994, pemerintah Jepang pertama kali juga turut serta memperkenalkan keamanan manusia melalui pidato Perdana Menteri Murayama di PBB pada Oktober 1995. Konsep "keamanan manusia" yang diperkenalkan oleh UNDP di adopsi oleh pemerintah Jepang sebagai pilar diplomasi negaranya, dan hari ini Jepang telah menjadi pendukung keamanan manusia di komunitas internasional. Selain itu, pemerintah Jepang telah mengembangkan kebijakan konkret tentang keamanan manusia di dalam program *Official Development Assistance* (ODA) negaranya. Jepang menganggap konsep ini sebagai landasan teoritis yang mengaitkan keamanan dengan bantuan pembangunan dan sarana upaya pembangunan perdamaian di wilayah konflik (Nasukawa, 2017, pp. 73-74).

Piagam ODA dari Kementerian Luar Negeri Jepang direvisi pada tahun 2003 untuk memenuhi tujuan pembangunan baru, keamanan manusia yang ditegakkan sebagai kebijakan dasar. Dalam mengatasi ancaman langsung terhadap individu seperti konflik, bencana, penyakit menular, penting tidak hanya mempertimbangkan perspektif global, regional, dan nasional, tetapi juga untuk mempertimbangkan perspektif keamanan manusia, yang berfokus pada individu. Oleh karena itu, Jepang menerapkan ODA untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa martabat manusia dijaga pada semua tahap, dari tahap konflik hingga tahap rekonstruksi dan pembangunan, Jepang akan memberikan bantuan untuk perlindungan dan pemberdayaan individu (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003, p. 2).

Pada bulan Februari 2005, kebijakan jangka menengah ODA baru dirumuskan, di mana metode konkret untuk menerapkan ODA ditunjukkan. Kebijakan jangka menengah

menyatakan bahwa keamanan manusia, "berarti berfokus pada individu individu dan membangun masyarakat di mana setiap orang dapat hidup bermartabat dengan melindungi dan memberdayakan individu dan komunitas yang terpapar ancaman aktual atau potensial." Selanjutnya, dalam rangka untuk mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh orang-orang, komunitas dan negara, kebijakan jangka menengah menyatakan bahwa Jepang akan mengatasi empat masalah prioritas "pengurangan kemiskinan," "pertumbuhan berkelanjutan," "menangani masalah global" dan "pembangunan perdamaian" yang mendukung perspektif "keamanan manusia." (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003)

Dengan demikian tujuan ODA adalah untuk mendukung upaya swadaya dari negara-negara berkembang yang ditunjukkan sebagai salah satu kebijakan dasar ODA Jepang. Jepang menghormati kepemilikan oleh negara-negara berkembang, dan menempatkan prioritas pada strategi pengembangan mereka sendiri. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Jepang akan memprioritaskan untuk membantu negara-negara berkembang yang melakukan upaya aktif untuk mengejar perdamaian, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi struktural di bidang ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, ODA Jepang menunjukkan selektivitas tertentu untuk bantuan.

Pada dasarnya *Official Development Assistance* (ODA) yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang diberikan melalui tiga jenis bantuan, yaitu pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Namun dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada bantuan hibah saja yang salah satu turunannya diperuntukkan bagi proyek khusus dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Bantuan hibah yang menjadi fokus penelitian ini bernama "*Grant Assistance for Grassroots Human Security Project*" atau yang biasa disingkat dengan kata GGP.

F. Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP)

Pemerintah Jepang memiliki program khusus untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang melalui kerjasama ekonomi yang dinamakan dengan Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance/ODA). Program ini telah menjadikannya sebagai instrumen kerjasama baru yang mempunyai dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Pada dasarnya *Official Development Assistance* (ODA) yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang diberikan melalui tiga jenis bantuan, yaitu berupa pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Namun dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada skema bantuan hibah saja yang salah satu turunannya diperuntukkan bagi proyek khusus dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Bantuan hibah yang menjadi fokus penelitian ini bernama "*Grant Assistance for Grassroots Human Security Project*" atau yang biasa disingkat dengan kata GGP.

Program ODA terus diperbarui oleh Pemerintah Jepang dengan dipekerkenalkannya skema *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) yang pertama kali dibentuk pada tahun 1989 sebagai modalitas bantuan untuk menanggapi kebutuhan di tingkat lokal dengan cepat atau sederhanya untuk membantu pembangunan sosial ekonomi masyarakat akar rumput di negara-negara berkembang. Anggaran tahunan yang dialokasikan oleh pemerintah Jepang untuk skema GGP telah meningkat secara bertahap sampai akhirnya memuncak pada tahun fiskal 2003 sebesar 15 miliar yen. GGP juga membangun reputasinya sebagai modalitas bantuan yang segera merespon kebutuhan akar rumput di negara-negara berkembang dan telah secara luas diakui sebagai skema yang memfasilitasi visibilitas bantuan oleh Pemerintah Jepang, skema GGP telah mengambil dimensi tambahan "keamanan manusia" untuk mengatasi kebutuhan yang muncul dari negara-negara berkembang atau negara-negara pasca konflik dalam mempromosikan proses pembangunan

perdamaian. Perkembangan dari program ODA dengan munculnya skema GGP juga telah memungkinkan diversifikasi terhadap aplikasinya dalam mengatasi kebutuhan yang muncul di arena yang membutuhkan bantuan pembangunan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005, p. i).

Pemerintah Jepang memiliki inisiatif untuk bekerjasama dengan organisasi internasional, komunitas internasional dan berbagai pemangku kepentingan dengan berbagi tujuan untuk menerapkan strategi pembangunan yang lebih umum dalam mengkoordinasikan kegiatan bantuan mereka. Jepang melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan internasional, negara-negara donor lainnya, NGO, perusahaan swasta, dan entitas lainnya. Secara khusus, Jepang akan meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki keahlian dan netralitas politik, dan akan berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan Jepang tercermin dengan tepat dalam pengelolaan organisasi-organisasi tersebut (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003, p. 3).

Pemerintah Jepang juga akan berkolaborasi dengan entitas di negara penerima bantuan seperti NGO, lembaga non profit lainnya, universitas, pemerintah lokal, organisasi ekonomi, organisasi pekerja, sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya akan diperkuat untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam menyalurkan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan untuk memanfaatkan teknologi dan keahlian mereka. Selain itu Jepang juga akan berkolaborasi dengan entitas serupa di negaranya dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisisnya ke dalam bentuk data valid agar bantuan yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan di negara penerima (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003, p. 7). Entitas tertentu seperti NGO atau lembaga non profit lainnya juga dijadikan Pemerintah Jepang sebagai mitra pelaksana proyek bantuannya.

GGP merupakan program bantuan keuangan yang ditawarkan oleh Pemerintah Jepang untuk proyek-proyek pembangunan yang dirancang khusus dalam memenuhi beragam kebutuhan di tingkat lokal pada negara-negara berkembang. Skema bantuan ini dibentuk sebagai dukungan untuk proyek-proyek yang diusulkan oleh berbagai badan seperti organisasi non-pemerintah (LSM, NGO, Yayasan dan lembaga non profit lainnya) baik berskala lokal maupun Internasional, sekolah, rumah sakit dan dalam keadaan tertentu, organisasi internasional dan institusi pemerintah juga bisa menjadi penerima bantuan ini. Program GGP telah memiliki reputasi yang sangat baik karena peranya dalam memberikan dukungan yang tepat waktu dan fleksibel bagi proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput (Menteri Luar Negeri Jepang, 2014).

Secara pelaksanaannya, program ini dibagi menjadi tiga jenis. *Pertama* bantuan hibah untuk pembangunan pada masyarakat tingkat akar rumput melalui NGO, Yayasan dan lembaga non profit lokal lainnya yang berperan sebagai lembaga penerima bantuan untuk melaksanakan proyek pembangunan di daerah yang telah menjadi usulan lembaga penerima tersebut. *Kedua*, sama halnya dengan yang pertama, hanya saja bantuan hibah ini diberikan kepada NGO dari Jepang sebagai mitra pelaksanaannya. Lalu yang *ketiga*, bantuan hibah akar rumput untuk kebudayaan, bantuan ini secara khusus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau NGO di negara-negara penerima bantuan untuk melaksanakan proyek kerjasama di bidang kebudayaan dan pendidikan. Tingkat akar rumput yang dimaksud dalam hal ini adalah lebih mengacu kepada masyarakat kalangan bawah yang terkena masalah kemanan manusia dan oleh sebab itu bantuan ini dinamakan dengan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) (Embassy of Japan in Indonesia, 2014). Berikut merupakan proyek yang dapat di danai beserta alur mendapatkannya:

1. Proyek pembangunan yang di danai dengan skema GGP

Melalui skema GGP, Jepang akan memberikan bantuan untuk pengembangan infrastruktur berskala kecil yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat akar rumput, seperti pembangunan pasar pedesaan, pelabuhan perikanan, jalan pedesaan, irigasi dan teknologi tepat guna untuk industri kecil, serta program keuangan mikro dan pengangguran yang ditargetkan untuk orang miskin. Bersamaan dengan langkah-langkah ini, tindakan akan diambil untuk memberdayakan orang miskin, seperti pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kemampuannya agar lebih produktif (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005).

Menurut (Embassy of Japan in Indonesia, 2014) syarat dan kriteria untuk sasaran proyek ini, yaitu proyek yang berskala kecil tapi memiliki benefit yang cukup besar untuk masyarakat tingkat akar rumput, diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan, mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan bersifat berkelanjutan sehingga bantuan yang diberikan memiliki manfaat jangka panjang walaupun pelaksanaan proyek sudah berakhir. Namun, perhatian khusus biasanya diberikan kepada proyek-proyek yang berada di bidang-bidang seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan primer, lingkungan hidup, bantuan pengentasan kemiskinan, bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, penanggulangan penyakit menular, pemberdayaan pengungsi atau korban konflik dan peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018) diuraikan beberapa contoh (bukan daftar lengkap) proyek yang memenuhi syarat untuk dibiayai, yaitu:

- a. pembaruan dan penyediaan peralatan medis untuk rumah sakit
- b. pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas agar tetap produktif
- c. Upaya pencegahan penyakit menular seperti malaria dan HIV / AIDS

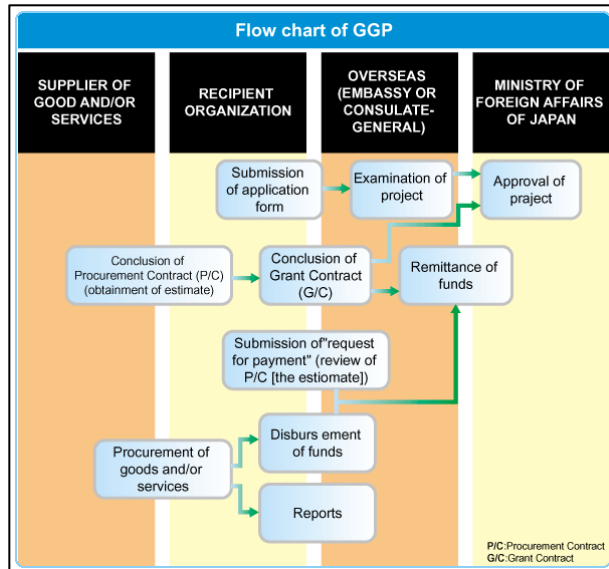
- d. Rehabilitasi fasilitas pertanian dan pembangunan kapasitas petani di daerah yang terkena dampak konflik
- e. Perbaikan dan pembangunan sekolah dasar
- f. Perbaikan dan persediaan peralatan medis untuk rumah sakit
- g. Pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan perempuan
- h. Bantuan kemanusiaan darurat untuk bencana alam
- i. Bantuan pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat
- j. Bantuan penyediaan teknologi tepat guna penunjang ekonomi
- k. dan lain-lain

Dari uraian diatas, selebihnya area prioritas dan kondisi terperinci akan ditentukan oleh Kedutaan Jepang atau konsulat di masing-masing negara, sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara tersebut. Lalu proyek yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat sebagai sasaran dalam skema GGP, yaitu :

- a. Dukungan untuk penelitian di lembaga pendidikan tinggi seperti universitas dan perguruan tinggi
- b. Peningkatan kapasitas organisasi
- c. Bantuan untuk kepentingan bisnis
- d. Proyek yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pembangunan seperti kegiatan budaya, seni dan olahraga
- e. Proyek yang memiliki tujuan politik, militer dan keagamaan
- f. Proyek yang tidak memiliki dampak positif jelas bagi komunitas akar rumput

2. Tahapan kerjasama dalam skema GGP

Tabel 2.1 Alur skema GGP



(sumber: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/g_roots/chart.html)

Secara umum skema GGP yang ditawarkan oleh Pemerintah Jepang memiliki tahapan-tahapan sistematis serta pemeriksaan dan evaluasi yang terperinci agar dana untuk proyek pembangunan bisa sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah yang membutuhkan. Menurut (Menteri Luar Negeri Jepang, 2014) tahapan-tahapan dalam prosedur tersebut, yaitu:

1) *Examination of the project*

Lembaga penerima hibah harus mengirimkan formulir aplikasi terlebih dahulu ke Kedutaan Jepang di negara tempat lembaga penerima hibah tersebut berada (di negara-negara tertentu, dapat mengajukan aplikasi ke Konsulat Jenderal Jepang). Formulir aplikasi juga harus berisi proposal proyek yang disertai dengan anggaran rinci untuk proyek, peta yang

menunjukkan lokasi proyek, studi kelayakan untuk proyek tersebut, serta lampiran brosur salinan peraturan dan badan hukum resmi yang dimiliki oleh lembaga penerima penerima (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018).

Dalam memilih proyek untuk pendanaan, Pemerintah Jepang menempatkan prioritas tinggi pada proyek yang memiliki dampak keberlanjutan, artinya lembaga penerima hibah dituntut harus mampu mengelola proyek pembangunan agar tetap berkelanjutan dengan baik. Lembaga penerima hibah harus memiliki badan hukum resmi sehingga dinyatakan legal kedudukannya sebagai calon penerima bantuan serta memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun dan mampu secara kapasitas dalam mengelola proyek. Selain itu lembaga penerima hibah tersebut harus memiliki *track record* yang baik terutama dalam mengelola sistem keuangan karena akan menjadi pertimbangan pemerintah Jepang dalam menyetujui proposal pendanaan proyek. Proyek-proyek yang disetujui oleh Pemerintah Jepang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, batas akhir pengajuan proposal adalah akhir Mei karena menyesuaikan dengan tahun anggaran Jepang, yang di mulai pada bulan April hingga ahir Maret di tahun berikutnya.

Setelah itu Pemerintah Jepang akan melakukan pegujian sebelum menentukan organisasi mana yang akan didanai. Ketika Kedutaan / Konsulat Jepang menerima aplikasi yang diajukan oleh pemohon (lembaga penerima hibah) dari berbagai daerah, proyek akan diperiksa dan diseleksi oleh staf Kedutaan atau Konsulat setempat, dengan perhatian khusus pada tujuan, dampak sosial ekonomi, dan biaya pengerjaan proyek sehingga proyek yang berpotensi dan cocok saja dipilih untuk mendapatkan hibah. Intinya selama proyek pembangunan yang menjadi sasaran diarahkan untuk bantuan terhadap masyarakat di tingkat akar rumput, bantuan tersebut dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan di bawah skema GGP.

2) *Site visit*

Kedutaan Jepang akan mengirim staf atau perwakilannya untuk mengunjungi lokasi proyek yang dipilih tujuannya adalah untuk melakukan *fact finding* atau pencarian fakta sebenarnya dilapangan. Setelah melakukan pengujian lapangan di lokasi proyek, Kedutaan Jepang akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menyetujui proyek tersebut dalam membuat keputusan apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk diberikan hibah.

3) *Grant Contract*

Kontrak Hibah akan ditanda tangani oleh Kedutaan / Konsulat Jepang dan lembaga penerima. Adapun isi dari kontrak tersebut adalah nota kesepahaman (MoU), judul proyek, nama lembaga penerima, tujuan dan rincian proyek, klausul yang menguraikan penggunaan dana secara rinci dan transparan; dan menentukan jumlah dana maksimum yang akan dicairkan. Setelah itu dana hibah yang disediakan akan ditetapkan jumlahnya setelah pemeriksaan dan evaluasi setiap aplikasi berdasarkan basis proyek per proyek. Menurut (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018) jumlah dana hibah per proyek umumnya tidak dapat melebihi US \$ 100.000. Bahkan dalam beberapa kasus luar biasa, jumlah hibah maksimum yang akan diberikan kurang dari US \$ 200.000. Dana bantuan yang diberikan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai gaji, bahan bakar, biaya perjalanan, biaya harian, biaya administrasi dan operasional lainnya dari organisasi atau institusi penerima bantuan.

4) *Disbursement of funds*

Organisasi penerima harus menyimpulkan kontrak pengadaan dengan pemasok atau kontraktor yang relevan untuk pengiriman barang dan / atau jasa. Kontrak diperiksa secara hati-hati oleh Kedutaan Jepang untuk memverifikasi bahwa biaya dan item anggaran yang diberikan sesuai. Setelah

menyetujui biaya dan menerima permintaan pembayaran dari organisasi penerima, Kedutaan akan mencairkan dana tersebut.

5) *Implementation of the project*

Organisasi penerima harus menggunakan hibah dengan benar dan eksklusif untuk pembelian produk dan / atau layanan yang diperlukan untuk proyek yang telah disetujui. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek diharapkan bisa berjalan tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati sebelumnya. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan kontrak hibah. Dalam hal ini pemerintah Jepang tidak hanya sebagai pemberi dana bantuan untuk proyek pembangunan namun juga sebagai pengawas jalannya proyek agar tetap berkelanjutan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi sasaran bantuan.

6). *Changes from the original plan*

Jika seandainya terjadi perubahan pada perencanaan awal dari proyek untuk suatu alasan tertentu organisasi penerima wajib berkonsultasi dengan kedutaan Jepang dan meminta persetujuan sebelum melakukan perubahan

7) *Reports*

Ada dua macam pelaporan yang diwajibkan oleh Kedutaan Besar Jepang atau konsulat setempat bagi organisasi penerima, *pertama* laporan mid term (sementara) selama pelaksanaan proyek. *Kedua*, laporan akhir jika proyek telah selesai, laporan akhir harus disertai dengan laporan keuangan dan tanda terima yang menunjukkan bagaimana dana digunakan.

8) *Audit*

Audit eksternal hanya diperuntukkan bagi setiap hibah yang diatas 3 juta yen (± 240 juta rupiah). Namun bila terjadi keadaan dimana dana proyek digunakan untuk tujuan selain dari anggaran awal yang telah ditetapkan (penyaaahgunaan diluar prosedur), atau jika ada dana tersisa pada penutupan proyek,

organisasi atau institusi penerima wajib sifatnya untuk mengembalikan sebagian atau semua dana ke Konsulat jenderal Jepang atau Kedutaan Jepang di negara tempat organisasi atau institusi tersebut menerima bantuan (Menteri Luar Negeri Jepang, 2014).

G. Beberapa proyek *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP)* di negara-negara berkembang

Sejak pertama kali diluncurkan hingga sekarang, GGP sudah tersebar ke berbagai negara-negara berkembang yang memiliki kerjasama ekonomi dengan Jepang. Berikut beberapa contoh skema GGP untuk mengatasi masalah keamanan ekonomi yang ada di Nigeria, Filipina dan Armenia.

1. Proyek Pembangunan Jembatan Gwagwa di Nigeria

Kedutaan Jepang memberikan bantuan untuk pembangunan jembatan di seberang Sungai Usman di Distrik Gwagwa. Distrik Gwagwa adalah pemukiman yang luas di bagian selatan Dewan Kota Daerah Abuja (AMAC), Wilayah Ibukota Federal Nigeria (Embassy of Japan in Nigeria, 2018). Kerjasama ini didasari oleh masalah keamanan ekonomi yang dialami oleh para petani di daerah pertanian Distrik Gwagwa di bagian Selatan Abuja (Ibu Kota Nigeria). Lahan pertanian yang terpisah oleh Sungai Usman menyebabkan para petani harus menyeberangi sungai dengan berjalan kaki menyusuri dasar sungai. Selain itu ketika musim hujan tiba, air sungai menjadi pasang sehingga para petani harus mengambil risiko dengan berenang menyebrangi sungai yang cukup dalam untuk mengolah tanah pertanian mereka. Bahkan dalam prosesnya, beberapa orang pernah tenggelam ketika menyebrangi sungai demi mengelola pertanian untuk kelangsungan hidup mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat memanfaatkan lahan luas yang mereka miliki, banyak lahan pertanian yang subur namun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena keterbatasan ini. Diperkirakan sekitar 200.000 hektar lahan pertanian yang tersedia di Distrik Gwagwa, namun hanya sekitar 50.000 hektar

lahan yang dapat dibudidayakan oleh para petani (Atonko, 2015).

Melihat situasi yang cukup menantang ini, NGO lokal di Kota Umuagwo bernama Umuagwo (Urualla) Rural Development Union mengajukan proposal *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) kepada Kedutaan Jepang di Nigeria. Pada tanggal 17 Desember 2015 proposal proyek disetujui oleh Kedutaan Jepang. Sama seperti skema GGP pada umumnya, jembatan Gwagwa dibangun melalui bantuan hibah sebesar 100.216 USD / 9.720.952 Yen Jepang (setara dengan 20 juta Naira Nigeria) oleh kedutaan Jepang yang bekerjasama dengan NGO lokal yaitu Umuagwo (Urualla) Rural Development Union sebagai mitra pelaksana proyek. Bantuan hibah yang diberikan oleh Kedutaan Jepang dipakai untuk membangun jembatan yang bisa menghubungkan Distrik Gwagwa yang terpisah oleh sungai, proyek GGP yang disetujui tersebut bernama “*Project for Construction of Gwagwa Bridge in Abuja Municipal Area Council in the Federal Capital Territory.*” Setelah proyek tersebut selesai, akhirnya jembatan ini bisa menjadi fondasi bagi para petani untuk bekerja di lingkungan pertanian mereka secara aman tanpa adanya kecelekaan kerja lagi dan produktivitas pertanian mereka juga semakin meningkat. Bahkan dengan adanya jembatan Gwagwa para petani bisa memiliki akses yang mudah untuk melakukan kegiatan jual beli dari hasil pertanian mereka ke pasar yang ada di sebarang sungai Usman sehingga bisa menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Atonko, 2015).

Pemerintah Jepang telah berusaha mendukung peningkatan kehidupan masyarakat Nigeria di bawah skema Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP). Selama beberapa dekade, GGP berperan aktif dalam menangani masalah sosial ekonomi yang mendesak di tingkat akar rumput Nigeria. Tercatat sejak tahun 1998, GGP telah terimplementasi sebanyak 158 proyek dengan total biaya sekitar 11 juta USD di seluruh wilayah Nigeria.

2. Proyek Penyediaan Modal Kredit Mikro untuk Peningkatan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Cotabato Selatan

Propinsi Cotabato Selatan merupakan salah satu daerah miskin di Filipina dengan penduduk yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh mata pencaharian berkelanjutan sehingga membuat daerah ini sering terjadi konflik berkepanjangan akibat kemiskinan. Kemiskinan dan ketidakstabilan pendapatan yang menimpa Masyarakat Cobato Selatan membuatnya sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank swasta. Akibatnya mereka tidak memiliki peluang yang cukup untuk meluncurkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan rutin mereka (Embassy of Japan in Philippines, 2010).

Melihat hal tersebut, sebuah organisasi pembangunan swasta nirlaba bernama South Cotabato Foundation, Inc. (SCFI) peduli akan hal tersebut untuk bekerja sebagai mitra pembangunan masyarakat yang terpinggirkan dan terbelakang di Provinsi Cotabato Selatan. SCFI terdaftar sebagai organisasi non saham yang bergerak dibidang *sociopreneur* telah aktif terlibat dalam proyek-proyek kredit mikro di Cotabato Selatan sejak tahun 1999 (South Cotabato Foundation, Inc., n.d.). Proyek kredit mikro adalah sistem peminjaman alternatif bagi kaum miskin pedesaan dan perkotaan untuk memberikan mereka akses yang mudah dalam mendapatkan kredit pinjaman untuk usaha berskala kecil. Proyek ini tidak hanya melibatkan kredit dengan suku bunga yang terjangkau sebesar 3,33% per bulan, tetapi juga mendorong para peminjam untuk menabung setiap minggunya agar membangun kemandirian dan menghasilkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Hingga saat ini, SCFI telah melayani lebih dari 6.000 klien aktif dengan tingkat pembayaran sebesar 95% (Manila Times, 2011).

Namun, proyek-proyek yang ada hanya mencakup sebagian kecil dari total masyarakat, sedangkan masalah utamanya lebih

banyak orang yang membutuhkan dukungan keuangan untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan mereka sehingga SCFI membutuhkan tambahan modal untuk melangsungkan kegiatannya. Dengan memanfaatkan Bantuan Hibah untuk proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP) yang disediakan oleh Pemerintah Jepang untuk negara-negara berkembang, SCFI mengajukan proposal GGP tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang di Manila untuk meningkatkan modalnya dalam melakukan proyek kredit mikro agar proyeknya dapat menjangkau lebih banyak penerima.

Akhirnya pada tanggal 25 November 2010 kedutaan Jepang menyetujui proposal GGP yang ditandai dengan penandatanganan kontrak hibah oleh Duta Besar Jepang, Makoto Katsura dan Direktur Eksekutif SCFI, Belen S. Fecundo di kantor Kedutaan Jepang Manila, kontrak tersebut dilakukan untuk proyek yang bernama "Proyek Penyediaan Modal Kredit Mikro untuk Pembagian Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Cotabato Selatan". Jumlah bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Jepang sebesar 183.947 USD / 20 juta YEN (sekitar 8,5 juta peso), didanai melalui Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP) (Embassy of Japan in Philippines, 2010).

Dengan bantuan asing ini, SCFI mendapatkan modal tambahan yang akan menguntungkan sekitar 930 pengusaha mikro di wilayah Kota Koronadal dan Kotamadya Banga, Tantangan dan Polomolok di Cotabato Selatan. Selain untuk modal tambahan, bantuan hibah juga mencakup pengadaan kendaraan untuk digunakan mengakses daerah-daerah yang berjauhan. Kendaraan ini sangat bermanfaat bagi SCFI untuk mengunjungi kliennya dan memantau proyek (Manila Times, 2011).

Perlu diketahui juga bahwa Jepang merupakan pedonor teratas bagi Filipina untuk bantuan pembangunan resmi (ODA). Pada Maret 2010, sudah ada sebanyak 434 proyek akar rumput yang telah didanai oleh GGP dan berkisar dari sekitar 1 hingga

4 juta peso yang telah dilaksanakan oleh LSM, unit pemerintah lokal dan organisasi nirlaba lainnya. Tercatat total hibah untuk proyek-proyek GGP di Filipina sampai tahun 2011 mencapai 18.982.775 USD. Dengan demikian GGP untuk Filipina diharapkan semakin berkontribusi untuk memupuk kemitraan strategis antara kedua negara dalam menuju masa depan (Embassy of Japan in Philippines, 2010).

3. Proyek lapangan kerja untuk pengungsi Suriah di Kota Yerevan, Armenia

Pada musim panas 2012, ketika konflik suriah semakin merajarela terutama di kota Aleppo, banyak warga Suriah keturunan etnis Armenia melarikan diri ke Armenia dan menyebar hingga ke Kota Yerevan yang merupakan Ibu Kota dari Armenia. Masuknya pengungsi Suriah secara tiba-tiba ke Armenia membawa tantangan baru bagi Armenia untuk mengintegrasikan populasi imigran yang besar ke dalam struktur ekonomi dan sosial Armenia. Pada saat itu, tidak ada yang mengerti kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Suriah kecuali orang Suriah sendiri. Melihat kekhawatiran yang terjadi menimpa pengungsi Suriah di Armenia, muncul sebuah NGO yang bernama Organisasi Amal Kompatriotik Aleppo (Aleppo- LSM) yang secara resmi terdaftar di Armenia pada 28 Oktober 2013. Sejak terbentuknya hingga sekarang, organisasi ini tetap setia pada cita-cita pendiriannya untuk terus mengatur kegiatan dan program promosi integrasi Suriah di Armenia, sambil menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi Armenia Barat. Sejauh ini tercatat lebih dari 6.100 warga Suriah yang rentan (sekitar 1.800 keluarga) telah menerima bantuan dari Aleppo-NGO sejak pertama kali terbentuknya organisasi ini (ALEPPO-CCO, 2013).

Dalam membantu meringankan kebutuhan ekonomi para pengungsi Suriah di kota Yerevan, Aleppo-NGO berinisiatif untuk membuat proyek lapangan kerja bagi para pengungsi. Oleh karena itu, Aleppo-NGO memanfaatkan bantuan-bantuan asing untuk proyek akar rumput terutama bantuan asing dari

Pemrintah Jepang dalam membangun proyek ini agar dapat tercapai dengan baik. Organisasi ini mengirimkan proposal GGP ke Kedutaan Jepang di Yerevan dan berhasil disetujui pada tanggal 14 Maret 2018 yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak Hibah oleh Eiji Taguchi, Duta Besar Jepang untuk Armenia dan Sarkis Balkhian, direktur eksekutif Aleppo-NGO, berlangsung di Aleppo Cuisine Centre. Kontrak hibah ini bernama “The Project for Creating Employment and Supporting Syrian-Armenian Refugees by Establishing a Cuisine Center in Yerevan” dan total hibah yang diberikan sebesar 40.635 USD / 4.607.358 YEN yang dialokasikan untuk menutupi biaya pekerjaan konstruksi fasilitas Aleppo Cuisine Center bagi para pengungsi Suriah di Yerevan. Aleppo Cuisine Center merupakan bisnis sosial berbasis pekerjaan yang diarahkan pada integrasi ekonomi pengungsi Suriah di Armenia. Setelah berbulan-bulan persiapan, tempat ini telah beroperasi sejak akhir April 2018 dan mulai menyajikan hidangan Timur Tengah yang lezat serta menawarkan jasa katering dan pengiriman, yang akan menghasilkan beragam makanan beku untuk didistribusikan ke toko kelontong dan restoran di seluruh Armenia (Armenpress, 2018).

Inovasi yang dihasilkan dari proyek ini berfokus untuk mempekerjakan kaum wanita, penyandang disabilitas dan masyarakat pengungsi Suriah yang rentan lainnya. Inovasi ini juga menawarkan kebijakan seperti jam kerja yang fleksibel bagi pengungsi dengan obligasi keluarga, mengalokasikan 100% dari laba bersihnya untuk penyediaan bantuan kemanusiaan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi para pengungsi yang rentan. Aleppo Cuisine Center akan mempekerjakan 70-90 pengungsi Suriah dalam 5 tahun pertama operasi dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang tumbuh parah di antara rumah tangga pengungsi Suriah dengan menyediakan pekerjaan yang aman bagi mereka untuk menghasilkan upah yang baik serta dibantu dengan pelatihan keterampilan lanjutan untuk memperkuat mobilitas ke atas (ALEPPO-CCO, 2018).